

**ANALISA KELEMBAGAAN LOKAL “MANGAJI PADI”
DALAM PERENCANAAN MUSIM TANAM USAHA TANI
PADI SAWAH PADA KELOMPOK TANI SEPAKAT
DI NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KABUPATEN SOLOK**

OLEH

SUDINO YARNEN
03115021

SKRIPSI



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**ANALISA KELEMBAGAAN LOKAL “MANGAJI PADI”
DALAM PERENCANAAN MUSIM TANAM USAHA TANI PADI
SAWAH PADA KELOMPOK TANI SEPAKAT
DI NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KABUPATEN SOLOK**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelembagaan lokal mangaji padi dalam perencanaan musim tanam padi sawah pada kelompok tani Sepakat nagari Supayang kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok dan untuk melihat peran serta seluruh stakeholders dalam mangaji padi tersebut

Penelitian dilakukan di kelompok tani sepakat nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan selama dua (2) bulan terhitung dari bulan April sampai Mei 2010. Metode yang digunakan adalah metode study kasus (*case study*). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan Focus Group Discussion (FGD) dengan key informan 15 orang. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk kedua tujuan penelitian

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa mangaji padi merupakan bentuk kelembagaan lokal masyarakat Supayang dalam berusaha tani padi sawah, yang dijadikan sebagai media untuk berkumpul, memanjatkan rasa syukur, mengadakan prosesi tolak bala, berdo'a, bersilaturahmi, bermusyawarah dan bermufakat untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat dan rencana usaha tani padi sawah pada musim yang akan datang

Pihak – pihak yang terlibat dalam mangaji padi meliputi unsur : 1. kelompok tani, terdiri dari pengurus dan anggota kelompok tani Sepakat dan berperan sebagai pembuat keputusan, pengorganisir, pelaksana dan pengontrol. 2. Tokoh masyarakat terdiri dari alim ulama, Cadiak Pandai dan ninik mamak, berperan sebagai pembuat keputusan dan pengontrol. 3. Unsur Pamerintah terdiri dari aparat wali nagari dan aparat jorong, berperan sebagai pendukung kegiatan. 4. Dinas Pertanian yang berperan sebagai pendukung, pengontrol dan pelaksana, dan 5. Unsur lembaga Masyarakat yang terdiri dari Kelompok tani undangan dan organisasi kepemudaan, berperan dalam mengontrol, mendukung dan melaksanakan hasil kegiatan

Diharapkan mangaji padi bisa dipertahankan oleh kelompok tani Sepakat dan kelompok tani lainnya yang melaksanakan mangaji padi. Dan kelompok tani lain / masyarakat ditempat lain agar selalu melestarikan kelembagaan lokalnya. Dikhususkan kepada dinas pertanian dan penyuluh pertanian, agar lebih memperhatikan aspek kelembagaan lokal dalam kegiatan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bangsa yang bhineka, kita memiliki dua macam sistem budaya yang sama-sama harus dipelihara dan dikembangkan, yakni sistem budaya nasional Indonesia dan sistem budaya etnik lokal. Sistem budaya nasional adalah sesuatu yang relatif baru dan sedang berada dalam proses pembentukannya. Sistem ini berlaku secara umum untuk seluruh bangsa Indonesia, tetapi sekaligus berada di luar ikatan budaya etnik lokal manapun (Sayuti,2005)

Pada sistem budaya lokal setiap daerah mempunyai kelembagaan lokal tersendiri dalam mengatur tatanan sosial kemasyarakatannya. Setiap daerah akan memiliki kelembagaan lokal yang berbeda, hal itu disesuaikan dengan budaya maupun ekologis pada daerah tersebut. Fungsi utama dari adanya kelembagaan lokal tersebut adalah untuk memfasilitasi seluruh masyarakat berpartisipasi dalam menentukan segala sesuatu yang menjadi pedoman mereka dalam berinteraksi baik dengan manusia, alam dan tuhan. Adapun tujuannya adalah demi kesejahteraan atau keberlanjutan kehidupan masyarakat itu sendiri (Sayuti,2005)

Kelembagaan sosial (*social tandard*) merupakan bagian terpenting dalam setiap organisasi sosial, karena ia merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bersama secara tertib dan efisien (Santoso,2002)

Kelembagaan lokal merupakan asosiasi masyarakat setempat yang bertanggung jawab atas proses kegiatan pembangunan setempat seperti rukun tetangga, arisan , kelompok pengajian dan sejenisnya. Yang jelas kelembagaan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat (Yonariza,2002)

Pada hakikatnya setiap masyarakat memiliki kelembagaan lokal yang berfungsi untuk mengontrol pengelolaan sumberdaya dan menciptakan instrumen yang membatasi eksploitasi yang didasarkan atas pertimbangan sosial, ekonomi, budaya dan ekologi lokal. Didalam komunitas masyarakat Sunda buhun misalnya ditemui beberapa kelembagaan seperti *buyut* (larangan memakan sesuatu karena dilarang leluhur), selektifitas pemanfaatan lahan berdasarkan teksturnya dan penempatan pemimpin lokal sebagai pemegang otoritas adat (Suryadi, 2005)

Kelembagaan tradisional yang selama orde baru telah dihancurkan dan diganti dengan organisasi yang bersifat nasional (seragam) namun terkooptasi oleh penguasa, nampaknya telah muncul kembali dan mulai mendapat sambutan yang baik. Selama masa orde baru hampir semua kelembagaan lokal yang merupakan jaring-jaring pengaman sosial telah dihancurkan dan diganti dengan jaring bantuan dari pemerintah yang bersifat nasional dan seragam telah menyebabkan masyarakat pedesaan menjadi tergantung kepada pihak luar (bahkan kepada kekuatan asing). Kondisi yang bersifat nasional, seragam dan memaksakan ini secara pasti telah mendapatkan perlawanan (resistensi). Pada masa sekarang jaring-jaring pengaman sosial tradisional lokal yang mandiri mulai dikembangkan lagi. Adanya sistem lumbung pith nagari, sambatan, atau arisan yang sifatnya saling menolong telah mulai dikembangkan (Suryadi, 2005)

Bagi Indonesia, sumberdaya dan keanekaragaman hayati sangat penting dan strategis artinya bagi keberlangsungan kehidupannya sebagai bangsa. Hal ini bukan semata-mata karena posisinya sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati, tetapi justru karena keterkaitannya yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki bangsa (*mega cultural diversity*). Para pendiri bangsa Indonesia sejak semula sudah menyadari bahwa negara ini adalah negara kepulauan yang majemuk sistem politik, sistem hukum dan sosial-budayanya. Semboyan "Bhineka Tunggal Ika" secara filosofis menunjukkan penghormatan bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keberagaman sistem sosial yang dimiliki (Suryadi, 2005)

Kelembagaan lokal yang ada dalam suatu masyarakat akan menjadi faktor penting dalam pengelolaan sumber daya alam, ketergantungan dan tidak terpisahkan antara pengelolaan sumber daya dan keanekaragaman hayati ini dengan sistem-sistem sosial lokal yang hidup di tengah masyarakat bisa secara gamblang dilihat dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan, baik dalam komunitas-komunitas lokal lainnya yang masih menerapkan sebagian dari sistem sosial berlandaskan pengetahuan dan cara-cara kehidupan tradisional. Disini mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosial-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya (Yonariza,2002)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Mangaji padi merupakan suatu bentuk kelembagaan lokal masyarakat nagari Supayang untuk berkumpul, bermusyawarah dan bermufakat dan merencanakan kegiatan musim tanam yang akan datang. Kelembagaan mangaji padi ini dilaksanakan setiap akan mulai turun ke sawah. Bentuk kelembagaan mangaji padi meliputi arti, sejarah, latar belakang, tujuan, sasaran, sumber dana, fasilitas yang digunakan, unsur – unsur yang terlibat, hal – hal yang diputuskan serta manfaat mangaji padi. Dalam mangaji padi ada nilai – nilai yang terkandung, diantaranya : 1) Nilai kearifan yang mengatur hubungan manusia dengan sang Khalik, tujuannya agar manusia selalu dekat dengan tuhan, berupa rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah 2) Nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar selalu harmonis, dalam bentuk gotong royong, penetapan upah bajak dan upah tanam dan pengaturan pemakaian air 3) Nilai yang mengatur hubungan manusia dengan alam, bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam
2. Setiap pemangku kepentingan mempunyai peranan yang berbeda – beda, baik dalam tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam kelembagaan lokal mangaji padi merupakan sebagai wadah untuk mengutarakan pendapat dengan bebas, jadi setiap pemangku kepentingan diberikan ruang sebesar – besarnya untuk berpartisipasi aktif

5.2 Saran

Diharapkan mangaji padi bisa dipertahankan oleh kelompok tani Sepakat dan kelompok tani lainnya yang masih melestarikan kelembagaan lokalnya. Dan kelompok tani lain / masyarakat ditempat lain agar bisa melestarikan kelembagaan lokalnya. Dikhususkan kepada dinas pertanian dan penyuluh pertanian, mangaji

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin.1985. *Persepsi Masyarakat Tentang Kubadayaan*. Djambatan. Jakarta
- Amang, Beddu. 1995. *Pembinaan Komoditi Pertanian Untuk Wilayah Timur*. Kanisius. Yogyakarta
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bouman, P. J. 1982. *Sosiologi Fundamental*. Gramedia. Jakarta
- Datuak Rajo Panghulu, I H. 1997. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Hadisapoetra, S. 1973. *Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah dan Usahatani Ikan*. Departemen Ekonomi Pertanian Faperta UGM.Yogyakarta
- Hernanto, Fadholi. 1989. *Ilmu Usahatani*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta
- Institute for Research and Empowerment (IRE). 2003. *Pembaharuan Pemerintah Desa*. Jakarta
- Kartasapoetra, A. G. 1994. *Tekhnologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta
- Mardikanto, Totok dan Sri Surtani. 1993. *Petunjuk Penyuluh Pertanian*. Usaha Nasional. Surabaya
- Mosher, A.T. 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. CV. Yasaguna. Jakarta
- , 1989. *Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif Untuk Melayani Pertanian Modern*. CV. Yasaguna. Jakarta
- Mubyarto. 1984. *Pengantar Ekonomi Pertanian, cetakan VI*. LP3ES. Jakarta
- Mudana, I Gede. 2005. *Kearifan Lokal, dari wacana Menuju Praktis*. Bumi Aksara. Jakarta
- Nababan, Abbdon. *Kearifan Tradisional : Awal Pengabdian pada Keberlanjutan Kehidupan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Nazir, M. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta